

Pendidikan Kewarganegaraan Transformatif: Menuju Warga Negara Berpikir Politis

Budi Ali Mukmin^{1*}, Oksari Anastasya Sihaloho²

^{1,2} Jurusan Pendidikan dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan

Abstract. This research examines the urgency of developing transformative citizenship education in Indonesia, by integrating a thinking politically approach. Through desk research on policy documents, national curriculum, and academic literature, this research reveals that civic education in Indonesia has not comprehensively explained the complex political reality after two decades of reform. The dominance of the cognitive-theoretical approach in the classroom is one of the factors why civic education is insufficient to understand how today's democratization process shapes the character of citizens. This research proposes a thinking politically approach as the foundation of transformative citizenship education, operationalized through a living citizenship model. This approach aims to teach citizens to understand Indonesia's daily political life, providing opportunities for every citizen to understand aspects of citizenship membership and civic democracy that position citizens as equal and have equal rights. We argue that transformative civic education is the foundation for strengthening citizens' reasoning capacity to carry out how popular control (Beetham, 1997) works, which is introduced through the channels of educational institutions from the beginning.

Keyword: Transformative Citizenship Education; Thinking Politically; Popular Control

Abstrak. Penelitian ini mengkaji urgensi pengembangan pendidikan kewarganegaraan transformatif di Indonesia, dengan mengintegrasikan pendekatan berpikir politis (thinking politically). Melalui metode desk research terhadap dokumen kebijakan, kurikulum nasional, dan literatur akademik, penelitian ini mengungkapkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di Indonesia belum mampu menjelaskan secara komprehensif realitas politik yang kompleks pasca dua dekade reformasi. Dominasi pendekatan kognitif-teoritis dalam ruang kelas menjadi salah satu faktor mengapa pendidikan kewarganegaraan tidak cukup memadai untuk memahami bagaimana proses demokratisasi hari ini membentuk karakter warga negara. Penelitian ini mengusulkan pendekatan berpikir politis (thinking politically) sebagai fondasi pendidikan kewarganegaraan transformatif, yang dioperasionalisasikan melalui model kewarganegaraan yang hidup (living citizenship). Pendekatan ini bertujuan untuk membelajarkan warga negara memahami realitas kehidupan politik Indonesia sehari-hari, memberikan kesempatan bagi setiap warga negara tidak hanya memahami aspek keanggotaan kewarganegaraan, tetapi juga aspek demokrasi kewargaan yang memposisikan warga negara setara dan memiliki hak yang sama. Kami berpendapat, pendidikan kewarganegaraan transformatif menjadi fondasi terhadap penguatan kapasitas nalar warga negara untuk menjalankan bagaimana popular control (Beetham, 1997) bekerja yang diperkenalkan melalui kanal-kanal institusi pendidikan sejak awal.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan Transformatif; Berpikir Politis; Popular Kontrol

Received: 26/08/2024

Revised: 14/09/2024

Accepted: 17/09/2024

Korespondensi:

Jurusan Pendidikan dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 20221

Email: budialimukmin@unimed.ac.id

PENDAHULUAN

Penelitian ini mengkaji pendidikan kewarganegaraan transformatif yang menekankan peran aktif warga sebagai warga negara demokratis dalam mengambil tindakan, menerapkan dan mendorong kebijakan, tindakan, dan perubahan yang sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kesetaraan (Banks, 2017). Meskipun pendidikan kewarganegaraan transformatif memegang peran krusial dalam penelitian ini, kami berpendapat bahwa untuk benar-benar mengasah nalar berpikir warga negara, diperlukan integrasi pendekatan berpikir politis atau yang sering disebut sebagai *Thinking Politically*. Pendekatan ini tidak hanya melengkapi, tetapi juga memperkuat fondasi pendidikan kewarganegaraan transformatif dengan memberikan kerangka berpikir kritis terhadap fenomena sosial dan politik. Dengan mengadopsi pendekatan berpikir politis, warga negara tidak hanya dibekali dengan pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga dilatih untuk menganalisis, memahami, dan merespons dinamika politik secara kritis dan kontekstual. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan akan lebih efektif dalam membentuk individu yang mampu berpikir kritis dan berpartisipasi secara substansial dalam kehidupan demokratis.

Banyak ahli sepakat bahwa salah satu tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk warga negara yang mampu memahami arti demokrasi baik secara ontologi, epistemologi, maupun aksiologi, yang pada akhirnya menghasilkan warga negara yang aktif dan partisipatif (Anderson, 2023; Jamieson, 2013; Martens & Gainous, 2013; Pratte, 1988). Faktanya, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia hari ini gagal untuk membentuk kesadaran warga negara terhadap makna dari proses demokrasi itu. Kegagalan ini dapat dilihat dari ketidakmampuan sistem pendidikan kewarganegaraan untuk menjelaskan serta merespons proses demokrasi Indonesia hari ini yang bagi sebagian kalangan dianggap sebagai kemunduran demokrasi, sebagaimana tercermin dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 yang diwarnai dengan praktik-praktik tidak etis, politik dinasti, manipulasi informasi, serta degradasi integritas dalam proses demokrasi tersebut. Kami berpendapat, kegagalan yang kita hadapi saat ini sudah dapat diprediksi jauh sebelumnya. Sebab, sistem pendidikan kewarganegaraan kita gagal mempersiapkan

warga negara yang kritis, partisipatif, dan berintegritas, sehingga kita tak berdaya menghadapi distorsi demokrasi yang terjadi hari ini.

Kegagalan sistem pendidikan kewarganegaraan dalam merespons politik demokrasi di Indonesia saat ini tidak terlepas dari struktur pedagogis yang cenderung bersifat hafalan (kognitif), dogmatis, dan tidak mampu mengembangkan kapasitas serta keterampilan sikap kewarganegaraan. Akibatnya, model pembelajaran seperti ini gagal dan kurang efektif dalam membentuk kerangka berpikir kritis atau perilaku kewarganegaraan yang substantif. Situasi ini tetap sama, meskipun Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengeluarkan dua kebijakan penting. *Pertama*, kebijakan terkait Kurikulum Merdeka Belajar untuk tingkat sekolah dasar, menengah, dan menengah atas. *Kedua*, kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk tingkat perguruan tinggi.

Meskipun terlihat menjanjikan secara konseptual, dua kebijakan di atas belum mampu memberikan kontribusi substansial dalam membangun nalar kewarganegaraan yang kritis dan partisipatif. Pada kurikulum merdeka belajar misalnya, beragam fakta menunjukkan bahwa banyak guru dan siswa kurang memahami standar kebijakan yang dituangkan dalam kurikulum Merdeka Belajar (Fajri & Andarwulan, 2023), banyak sekolah-sekolah masih menerapkan kompetensi berbasis kognitif dan kurikulum merdeka hanya sebatas laporan di atas kertas. Situasi serupa terjadi dengan kebijakan MBKM di tingkat perguruan tinggi. Kebijakan ini menghadapi banyak tantangan, di mana perguruan tinggi lebih disibukkan dengan urusan administratif akibat banyaknya kegiatan MBKM seperti pertukaran mahasiswa dan magang (Kemdikbud, 2021). Akibatnya, perguruan tinggi lebih fokus pada pengembangan keterampilan dan kompetensi teknis mahasiswa, daripada memberikan perhatian yang memadai pada pendekatan kewarganegaraan yang kritis. Sebab pemahaman mendalam tentang hak, tanggung jawab, dan peran aktif warga negara dalam demokrasi sangat penting di level perguruan tinggi. Sebab, perguruan tinggi akan menjadi penggerak generasi berikutnya dalam membangun dan memperkuat proses demokratisasi Indonesia. Padahal, kurikulum ini digadang-gadang sebagai kurikulum yang dapat meningkatkan *soft skills* dan *hardskill* (Hunaepi et al., 2024).

Untuk mengisi kesenjangan dari kebijakan di atas, kami mengusulkan pendekatan berpikir politis dalam sistem kurikulum pendidikan kewarganeraan. Kami percaya dengan apa yang dikatakan Jhon Dewey seorang filsuf pendidikan terkemuka, yang mengatakan bahwa demokrasi harus dilahirkan kembali setiap generasi, dan institusi pendidikan menjadi bidannya (Jamieson, 2013). Dalam konteks ini, kami mengadopsi pendekatan berpikir politis sebagaimana dijelaskan oleh sejumlah ahli. Freedon misalnya, menjelaskan bahwa berpikir politis mengacu pada cara warga negara berpikir tentang isu-isu penting dan tantangan yang mereka hadapi, seperti demokrasi, kemiskinan, serta keputusan yang berkaitan dengan hak-hak politik dan isu-isu serupa (Freedon, 2008). Di satu sisi, Bernard Crick lebih spesifik bagaimana berpikir politis menjadi bagian penting dalam pendidikan kewarganegaraan. Dia memandang pendidikan kewarganegaraan sebagai aktivitas yang sangat politis dalam diri warga negara yang memainkan peran penting dalam demokrasi. Pendidikan ini sangat terkait dengan aspek politik warga negara, termasuk cara mereka terlibat dalam proses politik dan bagaimana pembelajaran kewarganegaraan membentuk pemahaman politik setiap individu (Crick, 2005).

Merujuk dari dua argumentasi di atas, operasionalisasi berpikir politis dalam pendidikan kewarganegaraan meletakkan warga negara sedekat-dekatnya dengan realitas dalam dinamika sosial, ekonomi, politik dan budaya sebagai *living practices* atau pusat pembelajaran yang berfokus pada praktik kehidupan nyata dan konteks lingkungan sehari-hari, yang menjadikan siswa/mahasiswa sebagai subjek warga negara untuk belajar langsung dari pengalaman dan interaksi mereka dengan dunia di sekitar mereka. Yang paling utama ingin disentuh dengan pendekatan ini adalah sensitifitas cara kita berlaku sebagai warga negara, bagaimana kita memperlakukan warga negara yang lain, tindakan serta kontribusi apa yang dapat dilakukan warga negara dalam merespon kompleksitas dinamika politik Indonesia yang memiliki latar belakang historis, sosial, budaya dan agama yang beragam. Melalui cara ini, pembelajaran akan mengasah nalar berpikir kritis, reflektif, serta mampu partisipasi aktif akan menjadi sebuah kebiasaan. Dengan menempatkan warga negara sebagai subjek aktif, pendekatan berpikir politis mengubah praktik pendidikan kewarganegaraan menjadi proses yang dialogis dan transformatif (Freire, 2000), di

mana peserta didik tidak hanya belajar, tetapi juga berperan dalam membentuk realitas politik dan sosial di sekeliling mereka.

Di negara Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, sistem pendidikan kewarganegaraan yang mengendepankan berpikir politis sudah berjalan lebih dari satu dekade yang lalu. Hasil studi yang dilakukan Jamieson misalnya, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah menengah atas pembelajarannya telah mengacu tindakan secara politis dengan mengasah keterampilan, pengetahuan, dan komitmen yang diperlukan untuk mencapai tujuan publik seperti, mengorganisir masyarakat untuk mengatasi masalah sosial, memecahkan masalah dalam kelompok, berbicara di depan umum, mengajukan petisi dan protes untuk mempengaruhi kebijakan publik, dan memberikan suara (Jamieson, 2013). Dampaknya, siswa menjadi sensitif terhadap isu atau problem di lingkungan sekitar mereka dan lebih kritis terhadap kebijakan atau keputusan yang berdampak langsung kepada mereka ataupun kepada publik secara keseluruhan. Jamieson juga menambahkan, apa yang didapatkan siswa di sekolah menengah menjadi modal berharga yang dapat diteruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal serupa juga terjadi di sekolah-sekolah Inggris (UK), dimana pendidikan kewarganegaraan dapat memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil di mana semua kelompok berpartisipasi secara setara dalam kemajuan politik (Donbavand & Hoskins, 2021). Berpikir politis sudah dirancang dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang telah disesuaikan dengan jenjang pendidikannya. Mereka menegaskan bahwa sangat mustahil warga negara dapat berpartisipasi aktif jika generasi muda tidak dilibatkan secara politik, terlepas dari latar belakang sosial yang berbeda.

Dua kasuistik di atas menjadi perbandingan baik bagaimana pendidikan kewarganegaraan mengintegrasikan berpikir politis dalam proses pembelajarannya. Kabar baiknya, negara ini masih memiliki instrumen dan suasana demokratis yang berpotensi mendukung pembelajaran seperti itu. Kalaulah tujuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia bertujuan untuk menciptakan warga negara demokratis seperti apa yang diungkapkan oleh banyak para pemerhati pendidikan kewarganegaraan, sesungguhnya demokrasi akan bekerja lebih baik bila warga negara lah yang membuatnya bekerja dan bukan karena tuah elit politik, partai politik

ataupun negara yang membangun institusi demokrasi (Berenschot & Van Klinken, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode desk research, suatu pendekatan penelitian kualitatif yang berfokus pada analisis mendalam terhadap data sekunder. Proses penelitian dimulai dengan pengumpulan sumber-sumber relevan, meliputi dokumen kebijakan pemerintah terkait pendidikan kewarganegaraan, kurikulum nasional, artikel jurnal akademik serta berbagai laporan penelitian. Desk research dipilih salah satu metode penelitian yang efektif dengan memanfaatkan data yang sudah ada dan kunci keberhasilannya terletak pada kemampuan peneliti untuk memilih kumpulan data yang paling relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian (Moore, 2006).

Kami berpendapat, desk research menjadi metode yang sangat relevan untuk meneliti kesenjangan antara pendidikan kewarganegaraan Indonesia dan realitas politik kontemporer karena beberapa alasan ilmiah. *Pertama*, metode ini memungkinkan analisis komprehensif terhadap evolusi kebijakan dan kurikulum pendidikan kewarganegaraan dari waktu ke waktu, memberikan pemahaman mendalam tentang akar historis dari ketidakmampuan tersebut. *Kedua*, desk research memfasilitasi triangulasi data dari berbagai sumber sekunder seperti dokumen kebijakan, laporan penelitian, dan publikasi akademik, meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan. *Ketiga*, pendekatan ini memungkinkan perbandingan sistematis antara model pendidikan kewarganegaraan dengan dinamika politik aktual, mengidentifikasi kesenjangan spesifik dalam kurikulum. *Keempat*, metode ini efisien dalam mengakses dan menganalisis sejumlah besar data yang telah ada, memungkinkan pemahaman yang luas tanpa kendala waktu dan sumber daya yang biasanya terkait dengan penelitian lapangan. *Kelima*, desk research memfasilitasi analisis wacana kritis terhadap narasi pendidikan kewarganegaraan, mengungkap asumsi dan ideologi yang mendasarinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Membaca Model Pendidikan Kewarganegaraan

Persoalan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia saat ini adalah tidak dimasukkannya debat akademik kewarganegaraan dalam ruang-ruang pembelajaran. Imbasnya institusi-institusi pendidikan yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan tidak terbiasa dengan ragam dialektika bagaimana pola kewarganegaraan yang terus mengalami perubahan sesuai dengan perubahan dinamika politik yang berkembang baik nasional maupun global. Idealnya, dari berbagai macam dialektika inilah setting pendidikan kewarganegaraan mulai beranjak. Mencermati hal itu, menemukenali pola kewarganegaraan yang terus berubah menjadi perhatian serius yang dapat dijadikan sebagai pijakan awal untuk memahami bagaimana rute pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

Berbicara mengenai pola kewarganegaraan, maka kita akan di bawa ke dalam tiga pendekatan umum yakni; kewarganegaraan liberal, komunitarian dan republikan. Kewarganegaraan liberal merupakan tradisi yang paling awal muncul berdasarkan sejarah perkembangan tradisi klasik di Inggris yang dikembangkan oleh T H Marshall. Dalam pendekatan ini kewarganegaraan lebih menitik beratkan pada aspek status hukum, atau status yang diberikan kepada mereka yang menjadi anggota komunitas (Lister & Pia, 2008; Marshall & Bottomore, 1996). Ide pendekatan ini sangat dipengaruhi dari pandangan liberal yang dikumandangkan oleh Jhon Locke maupun Stuart Mill, dimana hak-hak individu, kebebasan dan persamaan di depan hukum menjadi landasan filosofinya (Schuck, 2002). Berdasarkan filosofi tersebut, kewarganegaraan liberal memiliki meyakini bahwa hak-hak yang dimiliki individu seperti hak sosial, sipil dan politik merupakan hak yang harus dimiliki dan mendapatkan perlindungan dari negara.

Hanya saja, pendekatan kewarganegaraan liberal tidak lepas dari berbagai kritikan khususnya dari pendekatan komunitarian yang mengatakan kewarganegaraan liberal terlalu sempit karena hak-hak dasar tersebut tidak hanya melekat pada level individu, melainkan juga melekat pada level komunitas-komunitas yang tumbuh berkembang di masyarakat. Karena itu, pendekatan kewarganegaraan

komunitarian lebih mengedepankan pentingnya hubungan antara individu dengan komunitas masyarakat yang memiliki nilai-nilai budaya beserta partikularitas yang melekat di dalamnya (Delanty, 2002; Kymlicka, 1995; Kymlicka & Norman, 2000). Gagasan utama dari pendekatan ini tidak terlepas dari filosofinya bahwa identitas sosial dan kepribadian masing-masing individu sebagian besar telah dibentuk dari adanya hubungan masyarakat yang kompleks, sehingga pendekatan ini sangat menjunjung tinggi keanekaragaman yang melekat dalam komunitas masyarakat seperti agama, etnis, maupun hak-hak kaum minoritas.

Di lain pihak, pendekatan republikan memiliki cara berbeda untuk memahami bagaimana memahami kewarganegaraan. Pendekatan republikan dianggap lebih baik karena mampu menjembatani dari dua pendekatan sebelumnya, dimana pendekatan ini tidak hanya memfokuskan pada hak-hak individu semata, melainkan memberikan perhatian pada hak kelompok (Isin & Turner, 2002). Selain itu, pendekatan republikan juga memberikan penekanan bahwa hak-hak yang dimiliki oleh individu maupun kelompok tidak bermakna apa-apa jika tidak dibarengi dengan kewajiban, tanggung jawab, serta berpartisipasi terhadap urusan kepublikan. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa antara hak individu dan kelompok tidak selamanya memiliki ide dan tujuan yang sama, karena itulah pendekatan ini memberikan kesempatan besar dibentuknya komunitas-komunitas politik, negara demokratis sebagai cara untuk mencapai *civic virtue* untuk mewujudkan aktivitas asosiasional, nalar publik, partisipasi politik dan komitmen terhadap kemaslahatan bersama-sama (Hiariej et al., 2016).

Di luar dari tiga pendekatan utama di atas, Stokke memberikan warna lain mengenai dimensi kewargaan modern saat ini meskipun argumentasinya memiliki tarikan nafas yang sama dari pendekatan yang ada sebelumnya (Stokke, 2017). Bagi Stoke, setidaknya terdapat empat dimensi kewargaan yakni; keanggotaan, status legal, hak, dan partisipasi. Keanggotaan dan status kewargaan terkait dengan inklusi kultural dan yuridis dalam komunitas warga negara, sementara hak dan partisipasi berkait erat dengan kepemilikan hak-hak dan penerimaan atas kewajiban-kewajiban yang menyatu dalam status kewarganegaraan. Jika dilihat secara seksama, empat dimensi tersebut saling terkait. *Pertama*, dalam hal keanggotaan, menurut Stoke

kewargaan memiliki batasan antara kewargaan di dalam dan di luar komunitas, dimana komunitas itu sendiri dan kriterianya bisa berubah berdasarkan dengan waktu dan ruang. *Kedua*, Berkaitan dengan status legal dimaknai sebagai atribut warga negara yang melekat didasarkan pada klausul berdasarkan kewargaan orang tua ataupun berdasarkan dimana seseorang dilahirkan. Atas dasar inilah status legal akan memunculkan sebuah hak dan kewajiban antara individu dengan negara. *Ketiga*, dalam hak kewargaan, hal ini berkaitan dengan status kewargaan formal. Stoke mengadopsi kerangka berfikir yang dikembangkan oleh (Marshall & Bottomore, 1996) dimana hak kewargaan terbagi menjadi tiga bagian yakni hak sipil (berkaitan dengan hak privat), hak politik (berhubungan dengan partisipasi politik) dan hak sosial (berkaitan dengan kesejahteraan). *Keempat*, berkaitan dengan partisipasi, kewargaan dimaknai dengan serangkaian bentuk kewajiban formal kepada negara. Persis seperti apa yang dikembangkan oleh pendekatan komunitarian, bahwa partisipasi di tingkat masyarakat (komunitas) akan membuat warga negara aktif sekaligus membawanya keluar dari ruang privat menuju ruang publik.

Untuk konteks Indonesia, memahami beragam model kewarganegaraan, mulai dari liberal, komunitarian, republikan, hingga dimensi kewargaan modern yang diajukan Stokke, menjadi fundamental dalam mengembangkan pendidikan kewarganegaraan yang kritis dan kontekstual di Indonesia. Pengajaran model-model ini tidak hanya memperkaya wawasan peserta didik tentang kompleksitas konsep kewarganegaraan, tetapi juga membekali mereka dengan kerangka analitis untuk memahami dan merespons dinamika politik kontemporer. Salah satu argumentasi mengapa hal ini perlu dilakukan karena adanya kemungkinan bahwa konsep kewarganegaraan saat ini terlalu disibukkan atau memaksakan diri dengan bangunan konsep-konsep kewarganegaraan yang sudah mapan. Hasil studi yang dilakukan (Bijl & Klinken, 2019) setidaknya mengisyaratkan hal itu bisa saja terjadi ketika mereka melihat historis pencarian konsep kewarganegaraan di negara-negara Asia. Di negara-negara Asia, Bijl dan Klinken mengatakan, pencarian jati diri kewarganegaraan justru mengganggu diri mereka sendiri karena adanya kecenderungan mengikuti pendekatan sosiologis yang ditawarkan oleh Weber yang hanya fokus pada warga negara otonom, memiliki komunitas, memiliki keterkaitan

dengan para elit dominan yang memberikan status legal persis seperti apa yang Weber bayangkan ketika di negara-negara eropa pada abad pertengahan. Dengan kata lain, negara-negara Asia tak sempat untuk menyelidiki secara mandiri untuk menemukenali konsep kewarganegaraan mereka sendiri sampai-sampai orang baratlah yang memberi tahu mereka tentang kewarganegaraan itu (Bijl & Klinken, 2019).

Dengan mengajarkan beragam model kewarganegaraan, institusi pendidikan dapat memfasilitasi pembentukan warga negara yang kritis, reflektif, dan mampu berpartisipasi aktif dalam ruang publik. Pendekatan ini juga membuka peluang untuk mengembangkan model kewarganegaraan yang lebih sesuai dengan konteks Indonesia, menghindari adopsi konsep Barat secara mentah-mentah sebagaimana dikritik oleh Bijl dan Klinken. Oleh karena itu, memasukkan pembelajaran tentang model-model kewarganegaraan ke dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan bukan hanya menjadi kebutuhan akademis, tetapi juga langkah strategis dalam mempersiapkan generasi masa depan yang mampu menavigasi kompleksitas demokrasi Indonesia dan berkontribusi dalam pembentukan identitas kewarganegaraan yang autentik dan responsif terhadap tantangan global.

Liku Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia

Heater mengajukan proposisi bahwa institusi pendidikan merupakan lokus ideal untuk kultivasi berbagai kebijakan kewargaan (Heater, 1999). Dalam konteks masyarakat yang ditandai oleh pluralitas agama, etnis, dan budaya, lembaga pendidikan dipandang sebagai arena yang kondusif untuk menegosiasikan keberagaman melalui proses pembelajaran yang terstruktur. Proposisi ini memunculkan beberapa pertanyaan krusial mengenai karakteristik institusi pendidikan yang mampu memenuhi fungsi tersebut, serta bagaimana kurikulum dan desain pedagogis yang relevan dapat dikembangkan. Hipotesis preliminar yang dapat diajukan adalah bahwa institusi pendidikan perlu mengadopsi kurikulum dan metodologi pembelajaran yang terintegrasi dengan mikrokosmos kehidupan kewargaan. Terlepas dari hal tersebut, analisis retrospektif terhadap trajektori pendidikan kewarganegaraan di Indonesia menjadi langkah imperatif untuk mengidentifikasi kesenjangan dan peluang pengembangan. Evaluasi kritis ini dapat

menjadi fondasi untuk merumuskan pendekatan pendidikan kewarganegaraan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial-politik kontemporer Indonesia.

Orde Lama dan Identitas Kewarganegaraan

Di Indonesia, rute pendidikan kewarganegaraan memiliki jalan berliku karena ekosistem dan tujuan pendidikan ditentukan melalui mekanisme politik pendidikan pada rezim siapa yang berkuasa. Pada masa Orde Lama misalnya, antara 1946-1966 politik pendidikan tersegmentasi menjadi tiga bagian periode (Sunarso, 2018; 9). *Pertama*, periode 1945-1950 dimana semangat revolusi ditanamkan melalui jalur pendidikan untuk mengkerangkai semangat dan jiwa patriotisme. *Kedua*, periode 1950-1959, pendidikan bertujuan untuk membentuk orang-orang bermoral, kompeten dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat di Indonesia. *Ketiga*, periode 1959-1966, pendidikan diwarnai dengan Manipol (UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan kepribadian Indonesia) yang dikembangkan dari filsafat Soekarno.

Selama ketiga periode tersebut, pendidikan kewarganegaraan, yang dikenal sebagai civic, memainkan peran krusial dalam pembentukan identitas nasional. Konsep civic pada masa itu menekankan pembentukan warga negara Indonesia yang berjiwa revolusioner dan anti-imperialis (Sunarso, 2009). Pendidikan kewarganegaraan menjadi sarana utama untuk menanamkan jati diri dan identitas bangsa Indonesia yang baru merdeka. Bukti konkret dari pendekatan ini terlihat dalam buku pedoman Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tahun 1959, yang menjadi referensi utama bagi peserta didik. Isi buku ini mencerminkan tujuan politik bangsa Indonesia saat itu, dengan cakupan materi yang komprehensif. Materi tersebut meliputi sejarah perjuangan rakyat Indonesia, Pancasila, UUD 1945, konsep demokrasi dan ekonomi terpimpin, serta peristiwa penting seperti Konferensi Asia Afrika. Selain itu, buku ini juga membahas kewajiban dan hak warga negara, manifesto politik, dan berbagai lampiran penting seperti dekrit presiden, lahirnya Pancasila, pidato Presiden Soekarno, Deklarasi Hak Asasi Manusia, serta konsep Panca Wardhana atau lima perkembangan (Seopardo et.al, 1963; Sunarso, 2009; 72).

Terlepas dari perdebatan mengenai nuansa sosialisme dalam pendidikan kewarganegaraan masa Orde Lama (Ubaedillah, 2018), terdapat aspek positif yang patut diapresiasi. Pendekatan pendidikan kewarganegaraan era tersebut berhasil mengintegrasikan literasi politik tidak hanya dalam konteks pembelajaran formal, tetapi juga melalui pengalaman langsung dengan realitas sosio-politik kontemporer. Fenomena ini menciptakan ekosistem pembelajaran yang dinamis, di mana masyarakat umum menjadi sumber informasi dan diskusi mengenai peristiwa-peristiwa politik, ekonomi, dan perkembangan demokrasi. Proses ini dapat diinterpretasikan sebagai embrio pembentukan 'politik pengetahuan' yang berakar pada pengalaman kolektif dan ditransmisikan melalui institusi pendidikan. Pendekatan ini memfasilitasi pemahaman yang lebih kontekstual dan aplikatif terhadap konsep-konsep kewarganegaraan. Namun demikian, fondasi awal ini mengalami diskontinuitas seiring dengan transisi politik pasca-1965 yang menandai berakhirnya era Orde Lama.

Orde Baru dan Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan Semu

Max Lane mengajukan tesis bahwa sejak 1965, diskursus politik di tingkat akar rumput di Indonesia mengalami stagnasi signifikan (M. Lane, personal communication, October 19, 2022). Fenomena ini dapat diatribusikan pada implementasi kebijakan otoritarian rezim Orde Baru yang secara sistematis membatasi aktivitas politik, termasuk di ranah institusi pendidikan, dengan justifikasi pencapaian stabilitas ekonomi dan politik nasional. Konsekuensinya, terjadi defisit literasi politik yang substansial di kalangan masyarakat akar rumput, mengakibatkan keterbatasan pemahaman mengenai peran warga negara sebagai entitas 'demos' dalam konteks demokrasi. Restriksi ini berimplikasi pada terhambatnya perkembangan kesadaran kritis warga negara terhadap fungsi dan tanggung jawab mereka dalam proses demokratisasi.

Rezim Orde Baru menginisiasi transformasi signifikan dalam pendidikan kewarganegaraan, menitikberatkan pada Pancasila dan Pendidikan Moral sebagai elemen sentral. Paradigma ini merupakan upaya reorientasi dari model civic yang dikembangkan pada era Orde Lama. Konsekuensinya, pendidikan kewarganegaraan diarahkan secara sistematis pada konstruksi identitas nasional dengan Pancasila

sebagai fondasi filosofisnya. Meskipun demikian, implementasi Pancasila di bawah pemerintahan Suharto menghadapi kritik substansial. Ubaedillah mengatakan interpretasi dan artikulasi Pancasila cenderung dipengaruhi oleh kepentingan politik rezim (Ubaedillah, 2018). Lebih jauh lagi, Pancasila seringkali diinstrumentalisasi sebagai alat legitimasi untuk merepresi oposisi politik. Fenomena ini mengilustrasikan dilema fundamental dalam pendidikan kewarganegaraan di bawah rezim otoriter; di satu sisi, ada upaya untuk membangun identitas nasional yang kohesif; di sisi lain, proses ini rentan terhadap manipulasi ideologis yang dapat mengancam esensi demokrasi dan pluralisme. Implikasinya, pendidikan kewarganegaraan, alih-alih menjadi sarana pemberdayaan warga negara, berpotensi menjadi instrumen kontrol politik.

Pendidikan kewarganegaraan era Orde Baru, yang seharusnya menjadi katalis demokrasi Pancasila, justru mengaburkan esensi demokrasi itu sendiri. Kurikulum dan materi pembelajaran dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi gagal mengembangkan nalar kritis warga negara dan memosisikan mereka sebagai demos sejati. (Kalidjernih, 2005) mengidentifikasi fenomena ini sebagai indoktrinasi politik sistematis melalui kurikulum dan materi ajar. Akibatnya, meskipun Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan konsep Negara Kesatuan menjadi inti pendidikan kewarganegaraan, implementasinya tidak berkorelasi dengan pembentukan pola pikir dan perilaku demokratis warga negara. Hal ini disebabkan oleh absennya ruang untuk mendiskusikan dan mengkritisi konsep-konsep tersebut dalam konteks realitas politik dan demokrasi kontemporer.

Analisis terhadap pendekatan pendidikan kewarganegaraan pada era Orde Baru mengindikasikan adanya regresi ke model *old school*, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh (Faulks, 2006). Model ini dicirikan oleh fokus yang terbatas pada relasi politik monolitik antara negara dan warga negara, dengan artikulasi hak dan tanggung jawab warga negara yang secara eksklusif dibatasi dalam kerangka teritorial negara. Konsekuensi logis dari paradigma ini adalah terbentuknya model kewarganegaraan yang cenderung pasif, dengan penekanan pada kepatuhan terhadap struktur administratif negara daripada partisipasi aktif dalam proses demokratis. Fenomena ini mencerminkan instrumentalisasi pendidikan

kewarganegaraan sebagai mekanisme untuk memproduksi warga negara yang kompatibel dengan agenda politik rezim, alih-alih memberdayakan mereka sebagai agen perubahan sosial-politik.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan kewarganegaraan pada era Orde Baru merepresentasikan sebuah paradoks fundamental dalam pembangunan identitas nasional dan demokrasi Indonesia. Meskipun secara retorik bertujuan untuk memperkuat fondasi negara melalui Pancasila dan pendidikan moral, implementasinya justru menghasilkan bentuk kewarganegaraan yang semu dan tidak substantif.

Reformasi dan Musimnya Gonta-Ganti Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan

Era Reformasi menandai titik balik dalam upaya pembenahan kebijakan pendidikan di Indonesia. Komitmen untuk memperbaiki sistem ini tercermin dalam proses perubahan kurikulum yang inklusif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan di luar aparatur negara, hingga terbitnya kebijakan sistem zonasi dalam pendidikan tingkat sekolah dasar (SD), dan menengah (SMP hingga SMA) (Mahpudin, 2020). Kolaborasi ini mencakup partisipasi akademisi, tokoh agama, dan praktisi yang fokus pada literasi kewarganegaraan. Terkait dengan kebijakan pendidikan kewarganegaraan, pendekatan multisektoral ini bertujuan untuk menghasilkan kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat demokratis pasca-Orde Baru.

Analisis terhadap hasil konsensus multipihak mengenai reformasi kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Indonesia awal dekade 2000-an mengindikasikan adanya pergeseran paradigmatik ke arah konsep demokrasi liberal (Sander & Yulaelawati, 2008). Manifestasi konkret dari transformasi ini terlihat dalam reorientasi fokus kurikuler yang menekankan pada transmisi pengetahuan, kultivasi keterampilan, dan internalisasi nilai-nilai demokratis kepada peserta didik, dengan tujuan eksplisit untuk memfasilitasi partisipasi aktif mereka dalam proses demokratisasi (Ubaedillah, 2018). Paradigma ini menunjukkan konvergensi dengan model pendidikan kewarganegaraan yang lazim diadopsi oleh negara-negara penganut demokrasi liberal, di mana tujuan utamanya adalah membekali setiap warga negara dengan kompetensi kognitif, psikomotorik, dan afektif yang esensial

untuk memahami dan mengaktualisasikan peran, hak, serta tanggung jawab mereka dalam konteks kewarganegaraan demokratis (Grima, 2008). Fenomena ini dapat diinterpretasikan sebagai refleksi dari upaya sistematis untuk melakukan recalibrasi pendidikan kewarganegaraan agar lebih responsif terhadap tuntutan demokratisasi pasca-Orde Baru, sekaligus sebagai strategi untuk mengakselerasi integrasi Indonesia ke dalam komunitas global negara-negara demokratis.

Upaya reformulasi pendidikan kewarganegaraan di era pasca-Reformasi menunjukkan dinamika yang signifikan, sejalan dengan transformasi berkelanjutan dalam kurikulum pendidikan nasional. Periode dua dekade pasca-reformasi ditandai oleh frekuensi perubahan kurikuler yang tinggi, mencerminkan upaya adaptif terhadap tuntutan sosio-politik yang dinamis. Pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas, tercatat setidaknya lima kali perubahan kurikulum yakni; Kurikulum Berbasis Kompetensi (2004), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (2006), Kurikulum 2013 (K13), Kurikulum Darurat (2020) sebagai respons terhadap pandemi COVID-19, dan Kurikulum Merdeka Belajar (2022). Frekuensi perubahan ini mengindikasikan adanya upaya berkelanjutan untuk menyesuaikan pendekatan pedagogis dengan perkembangan kontemporer, sekaligus menimbulkan pertanyaan kritis mengenai konsistensi dan efektivitas implementasi kebijakan pendidikan jangka panjang.

Pada level perguruan tinggi, bulan Januari tahun 2020 menandai titik balik signifikan dengan diluncurkannya kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. MBKM merepresentasikan paradigma baru dalam pendidikan tinggi Indonesia, yang secara eksplisit didesain untuk mengoptimalkan pengembangan kompetensi mahasiswa sesuai dengan bakat dan minat individual melalui eksposur langsung ke dunia profesional (Kemdikbud, 2021). Kebijakan ini mencerminkan upaya strategis untuk menjembatani kesenjangan antara pendidikan akademik dan tuntutan pasar kerja kontemporer. Esensi MBKM terletak pada orientasinya yang kuat terhadap persiapan karier, dengan penekanan pada pengalaman praktis dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan dinamika global saat ini. Implementasi MBKM dapat diinterpretasikan sebagai respons adaptif terhadap perubahan lanskap

ekonomi dan teknologi, bertujuan untuk meningkatkan daya saing lulusan dalam konteks pasar kerja yang semakin kompetitif dan terglobalisasi.

Analisis kritis terhadap evolusi kebijakan kurikulum pendidikan nasional menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai posisi dan relevansi pendidikan kewarganegaraan dalam konteks reformasi pendidikan kontemporer. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, kontroversi muncul terkait dengan transformasi nomenklatur dari 'Pendidikan Kewarganegaraan' menjadi 'Pendidikan Pancasila'. Argumentasi pemerintah menegaskan bahwa restrukturisasi ini tidak mengeliminasi esensi kewarganegaraan, melainkan mengintegrasikannya ke dalam kerangka nilai, moral, dan landasan filosofis berbangsa dan bernegara yang lebih komprehensif. Sementara itu, di tingkat pendidikan tinggi, pendidikan kewarganegaraan diimplementasikan melalui pendekatan *hidden curriculum* dalam delapan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).

Fenomena ini memunculkan diskursus kritis mengenai efektivitas dan kecukupan pendekatan tersebut dalam membentuk warga negara yang demokratis. Pertanyaan yang muncul adalah apakah integrasi dan implisitisasi pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum baru mampu memfasilitasi pengembangan kompetensi kewarganegaraan yang holistik, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang diperlukan dalam konteks demokrasi kontemporer. Evaluasi mendalam terhadap implementasi dan dampak dari reformulasi ini menjadi imperatif untuk memastikan bahwa tujuan fundamental pendidikan kewarganegaraan dalam mempersiapkan warga negara yang kritis, partisipatif, dan demokratis tetap terpenuhi di tengah dinamika perubahan kurikulum.

Evaluasi terhadap reformasi kurikulum pendidikan kewarganegaraan menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal dan pelaksanaan nyata. Meskipun secara formal kurikulum baru menempatkan pendidikan kewarganegaraan sebagai inti pembentukan karakter warga negara, ada kekurangan dalam mencapai tujuan utama, yaitu pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kewarganegaraan. Perubahan kurikulum ini belum sepenuhnya didukung oleh metode pengajaran yang mengintegrasikan Pancasila sebagai dasar filosofis. Akibatnya, ada perbedaan besar antara rencana ambisius dan pelaksanaan di

lapangan yang belum optimal. Situasi ini menyoroti perlunya perubahan menyeluruh, tidak hanya dalam konten kurikulum, tetapi juga dalam cara mengajar, untuk menghubungkan teori dan praktik dalam pendidikan kewarganegaraan. Dalam konteks ini, pendidikan kewarganegaraan transformatif menjadi imperatif. Pendekatan ini tidak hanya menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, tetapi juga memberdayakan peserta didik untuk menjadi warga negara yang kritis, reflektif, dan aktif.

Pendidikan Kewarganegaraan Transformatif

Mezirow merupakan salah satu akademisi yang paling banyak disebut terkait pembelajaran transformatif. Menurut Mezirow, pembelajaran transformatif merupakan bagian dari teori pendidikan yang fokus pada berpikir kritis, penalaran, dan pembelajaran berbasis pengalaman. Dalam pandangan Mezirow, individu belajar dari pengalaman hidup mereka sendiri serta melalui komunikasi dengan orang lain. Kemudian, mereka melakukan refleksi atas pengalaman-pengalaman tersebut, yang pada akhirnya bertransformasi menjadi pengetahuan dan pemahaman yang baru mereka (Mezirow, 1991; Mezirow & Taylor, 2009). Di sisi lain, Taylor mengatakan bahwa pembelajaran transformatif merupakan proses di mana individu mengalami perubahan mendasar dalam cara berpikir, merasa, dan bertindak. Inti dari teori ini adalah bahwa pembelajaran tidak hanya tentang akumulasi pengetahuan, tetapi juga perubahan pada struktur asumsi, nilai, dan perspektif seseorang (Taylor, 2017). Sementara Fleming melihat pembelajaran transformatif tidak hanya tentang perubahan internal individu tetapi juga tentang transformasi sosial yang lebih luas melalui hubungan sosial dan pengakuan yang diperoleh dalam interaksi dengan orang lain (Fleming, 2022). Dalam konteks ini Fleming ingin mengatakan bahwa individu belajar melalui pengalaman hidup mereka dan dari orang lain melalui dialog dan refleksi atas pengalaman mereka (Herman, 2023).

Berbagai definisi yang disampaikan oleh para akademisi di atas berkontribusi untuk mengarahkan tulisan ini pada tema pendidikan kewarganegaraan transformatif. Di Indonesia, dua dekade pasca reformasi, banyak para pendidik dan para pembuat kebijakan membuat banyak program serta kebijakan untuk menjadikan warga negara aktif, kritis dan memperkuat demokrasi melalui rute

pedagogis pendidikan kewarganegaraan. Namun, hingga saat ini masih banyak yang meragukan bagaimana dan mengapa pendidikan kewarganegaraan di Indonesia belum berhasil untuk mencapai tujuan tersebut. Terkait hal ini, kami ingin mengajukan sebuah rute pendidikan kewarganegaraan transformatif yang mengintegrasikan *thinking politically* dengan sebuah model atau rute pembelajaran yang kami sebut sebagai *living citizenship*. *living citizenship* merupakan pembelajaran yang menekankan pengalaman kewarganegaraan di mana individu terlibat secara aktif dalam kehidupan komunitas mereka dan bukan sekadar status hukum atau administratif, tetapi mencakup bagaimana individu mengalami, mempraktikkan, dan memaknai kewarganegaraan mereka dalam berbagai konteks kehidupan nyata. Melalui *living citizenship*, pembelajaran diarahkan untuk mendorong warga negara menuju partisipasi nyata dalam kehidupan bermasyarakat (Coombs & Potts, 2013; Potts, 2014).

Kami menyadari bahwa model ini tidak begitu lazim di Indonesia karena pendekatan ini menitik beratkan pada kerangka berpikir politik untuk memperkuat politik kewargaan yang diasah mulai sejak dini dengan berbagai kasus yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Meskipun demikian, kami dapat menjelaskan bagaimana *living citizenship* menjadi masuk akal daripada pendekatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebelumnya. Secara ontologis, *living citizenship* merupakan realitas kewarganegaraan dipahami sebagai aktivitas dan pengalaman sehari-hari, dan bukan sekadar status legal, di mana politik dilihat sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari, bukan domain terpisah. Pada sisi epistemologis, *living citizenship* diperoleh melalui pengalaman langsung dan refleksi atas praktik kewarganegaraan sehari-hari dan pengetahuan politik sebagai unit analisis reflektif terhadap fenomena yang dialami sehari. Sementara pada dimensi aksiologis, bertujuan membentuk warga negara yang kritis, reflektif, dan mampu berpartisipasi efektif dalam demokrasi.

Contoh menarik untuk melihat beroperasinya *living citizenship* dalam pendidikan kewarganegaraan adalah dengan mengambil kasus demokrasi lewat pemilu presiden tahun 2024 dengan mengajak siswa atau mahasiswa melihat bagaimana integritas demokrasi itu berjalan. Hal pertama yang dilakukan adalah

melihat realitas pemilu 2024, yang kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi potensi kecurangan serta merefleksikan bagaimana dampaknya terhadap perkembangan demokrasi. Proses selanjutnya adalah melakukan investigasi pada isu-isu spesifik seperti politik uang, manipulasi data pemilih, atau penyalahgunaan kewenangan. Pembelajaran kemudian diperkuat dengan rangkaian kegiatan apakah bersifat simulasi ataupun kampanye untuk mendesiminasikan hasil temuan yang diperoleh baik dalam ruang kelas ataupun dalam ruang diskusi.

Dengan demikian rute *Living Citizenship* yang dijelaskan merupakan manifestasi konkret dari prinsip-prinsip pendidikan kewarganegaraan transformatif. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang demokrasi, tetapi juga untuk mengubah cara mereka berpartisipasi dalam proses demokrasi sebagai warga negara yang kritis, aktif, dan bertanggung jawab. Tujuan ini selaras dengan orientasi perubahan sosial yang menjadi esensi dari pendidikan kewarganegaraan transformatif, mendorong masing-masing warga mengambil tindakan, menerapkan dan mempromosikan kebijakan, tindakan, dan perubahan yang konsisten dengan nilai-nilai seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kesetaraan (Banks, 2017).

Di sini, pendidikan kewarganegaraan transformatif akan menonjolkan pada daya nalar kritis warga negara dengan menonjolkan aspek politik, baik dalam hal *pedagogy* maupun dalam rute aktualisasinya. Melalui berpikir politik, pendidikan kewarganegaraan akan membelajarkan warga negara memahami realitas kehidupan politik yang nyata. Berbekal itulah, warga negara digerakkan menjadi aktif karena mereka memiliki literasi politik sehingga mereka dapat mempengaruhi atau memiliki rasa tanggung jawab terhadap urusan publik dan memiliki kepekaan terhadap permasalahan warga negara di semua tingkatan. Persis seperti apa yang dikatakan (Banks, 2017) bahwa pendekatan transformatif dalam pendidikan kewarganegaraan membutuhkan daya nalar kritis di kedua belah pihak yakni tenaga pendidik dan peserta didik, sehingga berkontribusi mendorong mereka untuk mengidentifikasi masalah dalam masyarakat, memperoleh pengetahuan yang berkaitan dengan budaya dan bahasa, mengidentifikasi dan memperjelas nilai-nilai mereka, serta membantu mereka dalam mengambil keputusan.

Seperti apa yang telah kami sebutkan pada bagian sebelumnya, pendidikan kewarganegaraan transformatif memiliki skenario berbeda dengan pendidikan kewarganegaraan yang ada sebelumnya. Dikarenakan tujuan pendidikan kewarganegaraan transformatif membutuhkan tindakan politik yang memiliki karakter kritis, skenario pembelajaran yang kami ajukan meminjam skenario pendidikan kewarganegaraan yang dikembangkan oleh Johnson dan Morris (Johnson & Morris, 2010, 2012). Kami memilih skenario ini karena memiliki kesesuaian dengan rute pembelajaran kewarganegaraan transformatif yang mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis, dan pembentukan sikap yang memotivasi individu untuk berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat demokratis.

Tabel.1.
Skenario Pendidikan Kewarganegaraan Transformatif

	Politics/ideology	Social/collective	Self/subjectivity	Praxis/engagement
Knowledge	Knowledge and understanding of histories, societies, systems, oppressions and injustices, power structures and macrostructural relationships.	Knowledge of interconnections between culture, power and transformation; non-mainstream writings and ideas in addition to dominant discourses	Knowledge of own position, cultures and context; sense of identity	Knowledge of How collectively to effect systematic change; how knowledge it self is power; how behaviour influences society and injustice
Skills	Skills of critical and structural social analysis; capacity to politicise notions of culture, knowledge and power; capacity to investigate deeper causalities	Skills in dialogue, cooperation and interaction; skills in critical interpretation of others' viewpoints; capacity to think holistically	Capacity to reflect critically on one's 'status' within communities and society; independent critical thinking; speaking with one's own voice	Skills of critical thinking and active participation; skills in acting collectively to challenge the status quo; ability to imagine a better world
Values	Commitment to values against injustice and oppression	Inclusive dialogical relationship with others' identities and values	Concern for social justice and consideration of self-worth	Informed, responsible and ethical action and reflection
Dispositions	Actively questioning; critical interest in society and public affairs; seeks out and acts against injustice and	Socially aware; cooperative; responsible towards self and others; willing to learn with others	Critical perspective; autonomous; responsible in thought, emotion and action;	Commitment and motivation to change society; civic courage; responsibility

oppression	forward thinking; in touch with reality	for decisions and actions.
------------	--	-------------------------------

Sumber: (Johnson & Morris, 2010)

Tabel di atas menyajikan kerangka pendidikan kewarganegaraan transformatif yang terbagi ke dalam empat aspek utama: pengetahuan (Knowledge), keterampilan (Skills), nilai (Values), dan disposisi (Dispositions). Tabel ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan transformatif tidak hanya fokus pada pengetahuan faktual, tetapi juga menekankan pengembangan kemampuan berpikir kritis, refleksi, dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Pada aspek pengetahuan, pendidikan kewarganegaraan menekankan pemahaman tentang sistem politik, sejarah, budaya, dan struktur kekuasaan, serta kesadaran terhadap ketidakadilan sosial. Pada bagian Keterampilan, siswa perlu mengembangkan keterampilan dialog, analisis, dan berpikir kritis untuk mengevaluasi berbagai perspektif dan untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Pada aspek nilai, Pendidikan kewarganegaraan transformatif menanamkan nilai-nilai seperti keadilan sosial, kesetaraan, dan rasa hormat terhadap keragaman. Sementara pada aspek disposisi, setiap warga negara didorong untuk menjadi individu yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam masyarakat, serta memiliki komitmen untuk berpartisipasi dalam perubahan sosial.

Sebagai ilustrasi, jika Pancasila dikatakan sebagai filosofi pendidikan kewarganegaraa di Indonesia, maka pengetahuan tentang politik dan ideologi Pancasila harus segera diperkenalkan, diselidiki, diperbincangkan, bila perlu diperdebatkan sedari awal kepada peserta didik sebagai bekal pengetahuan bagi mereka untuk melihat realitas politik demokrasi Indonesia yang penuh dengan budaya, agama, suku dan politik yang berbeda. Melalui perbincangan dan perdebatan inilah pembentukan karakter, keterampilan, nilai, serta sikap warga negara akan terbentuk. Dengan begitu, Pancasila akan keluar dari labeling hafalan yang bersifat dogmatis dan Sasanti Bhineka Tunggal Ika menjadi kekuatan dalam pematangan demokrasi dalam bingkai ke-Indonesia yang besar (Santoso et al., 2018). Tidak menutup kemungkinan terdapat banyak perdebatan di sana-sini mengenai kerangka

tersebut. Namun, cara ini memungkinkan dapat membuat kapasitas nalar politik warga negara akan diasah dan dibiasakan sebagai upaya membentuk fondasi narasi politik dan pengetahuan demokrasi warga negara yang selama ini tak kunjung membuat kesadaran bahwa warga negara lah sebagai tuan rumah dalam ekosistem demokrasi itu sendiri.

Akhirnya, kami menyadari bahwa pendidikan kewarganegaraan transformatif tidak bisa bergerak sendirian jika tidak terintegrasi dengan lintas disiplin ilmu lainnya dan terkait dengan realitas kehidupan yang penuh dengan keragaman (Purta et al., 1999). Maka dari itu, pendidikan kewarganegaraan harus bersifat menyatu dengan ilmu lainnya seperti ekonomi, hukum, budaya, agama, pengetahuan alam, dan sebagainya. Di sinilah tantangan pendidikan kewarganegaraan transformatif itu sesungguhnya. Melalui kolaborasi dengan disiplin ilmu lainnya, pendidikan kewarganegaraan transformatif tidak lagi mengendap pada pembentukan warga negara demokratis ala Schumpeterian yang hanya fokus pada partisipasi kewargaan di arena institusi-institusi demokrasi maupun elektoral semata. Justru, pendidikan kewarganegaraan transformatif menjadi fondasi yang baik terhadap penguatan kapasitas nalar warga negara untuk menjalankan bagaimana kontrol popular itu dilakukan seperti gagasan demokrasi yang disampaikan Beetham (Beetham, 1997).

Merajut hal di atas, pendidikan kewarganegaraan transformatif menjadi sebuah cara yang arif untuk memberdayakan warga negara agar memiliki kemampuan dalam mengartikulasikan berbagai gagasan maupun kepentingan-kepentingannya berdasarkan bekal pengetahuan yang dimiliki sehingga warga negara tidak hanya berdaya melalui otot, namun berdaya secara akal pikirannya. Melalui pengayaan pengetahuan yang bersumber dari realitas politik yang sesungguhnya, pendidikan kewarganegaraan transformatif memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk tidak hanya paham aspek keanggotaan kewarganegaraan yang tunduk pada negara, tetapi juga aspek demokrasi kewarganegaraan yang memposisikan warga negara setara antara satu sama lain dan mampu melakukan intervensi politik (Ruitenberg, 2015).

KESIMPULAN

Kebijakan Kurikulum Merdeka dan MBKM yang dikeluarkan pemerintah patut diapresiasi. Kebijakan ini sejalan dengan gagasan Paulo Freire yang menekankan kebebasan dalam proses pembelajaran dan menempatkan warga negara sebagai subjek pendidikan (Freire, 2000). Namun, efektivitas kebijakan ini bergantung pada komitmen semua pihak dalam memanfaatkannya secara optimal. Perlu dicermati bahwa implementasi kebijakan saat ini cenderung berfokus pada penguatan kapasitas warga negara untuk bersaing di dunia kerja. Banyak perguruan tinggi lebih memilih menempatkan mahasiswa di dunia usaha dan industri daripada melibatkan mereka dalam isu-isu kemasyarakatan dan kepublikan. Meskipun pengembangan keterampilan industri penting, ada risiko terjadinya dehumanisasi pendidikan gaya baru yang dapat merugikan mahasiswa secara sistematis.

Bangsa ini sangat membutuhkan pendidikan yang membangun narasi politik dan demokrasi kewargaan untuk terus memperbaiki kualitas demokrasi dan keluar dari jebakan demokrasi formal. Sebab itu, pendidikan kewarganegaraan transformatif menjadi alternatif penting untuk memperkuat kapasitas warga negara dalam menjalankan kontrol populer. Desain pembelajaran kewarganegaraan harus melampaui praktik-praktik demokrasi formal. Munculnya ruang-ruang publik baru, seperti media sosial, menjadi modal berharga dalam mendukung pendidikan kewarganegaraan transformatif. Ruang-ruang ini menjadi tren bagi generasi muda untuk mendiskusikan berbagai isu politik, ekonomi, agama, dan budaya.

Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan transformatif berpotensi menciptakan konektivitas antara generasi muda dengan dunia politik. Pendekatan ini dapat dilakukan secara imajinatif, menunjukkan hubungan yang jelas antara kehidupan sehari-hari mereka dengan realitas politik yang lebih luas. Melalui pendidikan kewarganegaraan transformatif, diharapkan dapat terbentuk generasi warga negara yang kritis, aktif, dan mampu berkontribusi secara nyata dalam memperkuat demokrasi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, L. W. (2023). Civic education, citizenship, and democracy. *Education Policy Analysis Archives*, 31. <https://doi.org/10.14507/epaa.31.7991>
- Banks, J. A. (2017). Failed Citizenship and Transformative Civic Education. *Educational Researcher*, XX(X), 1–12. <https://doi.org/DOI: 10.3102/0013189X17726741>
- Beetham, D. (1997). Linking democracy and human rights. *Peace Review*, 9(3), 351–356. <https://doi.org/10.1080/10402659708426076>
- Berenschot, W., & Van Klinken, G. (2018). Informality and citizenship: The everyday state in Indonesia. *Citizenship Studies*, 22(2), 95–111. <https://doi.org/10.1080/13621025.2018.1445494>
- Bijl, P., & Klinken, G. van. (2019). Citizenship in Asian history. *Citizenship in Asian History*, *Citizenship Studies*, 23(3), 189–205. <https://doi.org/10.1080/13621025.2019.1603268>
- Coombs, S., & Potts, M. (2013). Living citizenship: Transcending the cultural divide. *Educational Action Research*, 21(3), 429–443. <https://doi.org/10.1080/09650792.2013.813401>
- Crick, B. (2005). *Essays on citizenship* (New ed). Continuum.
- Delanty, G. (2002). Communitarianism and Citizenship. In E. F. Isin & B. S. Turner (Eds.), *Handbook of Citizenship Studies*. London. SAGE Publication.
- Donbavand, S., & Hoskins, B. (2021). Citizenship Education for Political Engagement: A Systematic Review of Controlled Trials. *Social Sciences*, 10(5), 151. <https://doi.org/10.3390/socsci10050151>
- Fajri, T. A. A., & Andarwulan, T. (2023). Implementation Of The Merdeka Curriculum In Indonesia: Challenges And Opportunities. *ERUDIO Journal of Educational Innovation*, 10(2), 204–212.
- Faulks, K. (2006). Rethinking citizenship education in England. *Education, Citizenship and Social Justice*, 1(2), 123–140. <https://doi.org/DOI: 10.1177/1746197906064673>
- Fleming, T. (2022). Mezirow's theory of transformative learning: In dialogue with Honneth's critical theory. In E. Kostara, A. Gavrielatos, & D. Loads (Eds.), *Transformative Learning Theory and Praxis New Perspectives And Possibilities* (1st ed., pp. 3–14). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429450600-2>

- Freeden, M. (2008). Editorial: Thinking politically and thinking ideologically. *Journal of Political Ideologies*, 13(1), 1–10. <https://doi.org/10.1080/13569310701828120>
- Freire, P. (2000). *Pedagogy of the oppressed* (30th anniversary ed). Continuum.
- Grima, C. (2008). *Core Values For Democratic Citizenship Education In Liberal Democratic States* [Electronic Thesis and Dissertations]. University of Malta Library.
- Heater, D. (1999). *What is Citizenship*. Polity Press.
- Herman, M. (2023). Transformative Learning: Empowering Individuals To Challenge Their Assumptions And Create Positive Change. In *Revolutionizing Education By Embracing The Modern Learning Era* (International Collaboration Book Chapter, pp. 1–202). Stipas Publisher.
- Hiariej, E., Alvian, R. A., Ardhani, M. I., & Taek, A. M. (2016). MONOGRAPH on Politics and Government. *Politics and Government (PolGov) Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) FISIPOL UGM.*, 10(1), 1–69.
- Hunaepi, H., Suharta, & Putu, I. G. (2024). Transforming Education in Indonesia: The Impact and Challenges of the Merdeka Belajar Curriculum. *Path of Science*, 10(6), 5026–5039. <https://doi.org/10.22178/pos.105-31>
- Isin, E. F., & Turner, B. S. (2002). Citizenship Studies: An Introduction. In E. F. Isin & B. S. Turner (Eds.), *Handbook of Citizenship Studies*. London. SAGE Publication.
- Jamieson, K. H. (2013). The Challenges Facing Civic Education in the 21st Century. *Daedalus*, 142(2), 65–83. https://doi.org/10.1162/DAED_a_00204
- Johnson, L., & Morris, P. (2010). Towards a framework for critical citizenship education. *The Curriculum Journal*, 21(1), 77–96. <http://dx.doi.org/10.1080/09585170903560444>
- Johnson, L., & Morris, P. (2012). Critical citizenship education in England and France: A comparative analysis. *Comparative Education*, 48(3), 283–301. <http://dx.doi.org/10.1080/03050068.2011.588885>
- Kalidjernih, F. (2005). *Post-Colonial Citizenship Education: A Critical Study of the Production and Reproduction of the Indonesian Civic Ideal* [Disertasi]. Australia. University of Tasmania.
- Kemdikbud. (2021). *Panduan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus*

- Merdeka (MBKM) Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi Program Sarjana Terapan. Direktorat Pendidikan Tinggi dan Profesi Direktorat Jendral Pendidikan Vokasi.
- Kymlicka, W. (1995). *Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights*. Clarendon Press ; Oxford University Press.
- Kymlicka, W., & Norman, W. J. (Eds.). (2000). *Citizenship in diverse societies*. Oxford University Press.
- Lane, M. (2022, October 19). *The Jokowi-Prabowo Election 2.0*. [Personal communication].
- Lister, M., & Pia, E. (2008). *Citizenship in contemporary Europe*. Edinburgh University Press.
- Mahpudin, M. (2020). Hak Warganegara Yang Terampas: Polemik Kebijakan Sistem Zonasi dalam Pendidikan Indonesia. *Jurnal Transformative*, 6(2), 148–175. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2020.006.02.2>
- Marshall, T. H., & Bottomore, T. (1996). *Citizenship and social class* (Republ. as a Pluto Classic; [Nachdr. der Ausg.] 1992). Pluto Press.
- Martens, A. M., & Gainous, J. (2013). Civic Education and Democratic Capacity: How Do Teachers Teach and What Works? *Social Science Quarterly*, 94(4), 956–976. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6237.2012.00864.x>
- Mezirow, J. (1991). *Transformative Dimensions of Adult Learning*. Jossey-Bass Publisher.
- Mezirow, J., & Taylor, E. W. (2009). *Trasnformative Learning in Practice*. Jossey-Bass.
- Moore, N. (2006). *How to do research: A practical guide to designing and managing research projects* (4th, revised ed ed.). Facet.
- Potts, M. (2014). Living Global Citizenship: A New Pedagogy for Citizenship Education. *Educational Journal of Living Theories*, 7(2), 102–118.
- Pratte, R. (1988). Civic education in a democracy. *Theory Into Practice*, 27(4), 303–308. <https://doi.org/10.1080/00405848809543369>
- Purta, T., Judith, Schwile, Jhon, Amadeo, & Ann, J. (1999). *Civic education across countries: Twenty-four national case studies from the IEA Civic Education Project*. IEA.

- Ruitenbergh, C. W. (2015). The Practice of Equality: A Critical Understanding of Democratic Citizenship Education. *Democracy & Education*, 23(1), 1–8.
- Sander, M. F., & Yulaelawati, E. (2008). Citizenship Discourse in the Context of Decentralisation: The Case of Indonesia. In *Citizenship Curriculum in Asia and the Pacific*. Comparative Education Research Centre, The University of Hong Kong and Springer.
- Santoso, P., Samadhi, W. P., & Bayo, L. N. (2018). Peta Demokrasi Berbasis Variasi Rezim Lokal. In L. N. Bayo, P. Santoso, & W. P. Samadhi (Eds.), *Rezim Lokal Di Indonesia Memaknai Ulang Demokrasi Kita*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia bekerja sama dengan PolGov Fisipol UGM dan University of Oslo.
- Schuck, P. H. (2002). Liberal Citizenship. In E. F. Isin & B. S. Turner (Eds.), *Handbook of Citizenship Studies*. London. SAGE Publication.
- Stokke, K. (2017). Politics of Citizenship: Towards an Analytical Framework. In E. Hiarij & K. Stokke (Eds.), *Politics of citizenship in Indonesia* (First edition). Yayasan Pustaka Obor Indonesia in cooperation with PolGov Fisipol UGM and University of Oslo.
- Sunarso. (2009). Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan Di Indonesia Dari Rezim Ke Rezim. *Humanika*, 9(1), 67–80. <https://doi.org/10.21831/hum.v9i1.3784>
- Taylor, E. W. (2017). Transformative Learning Theory. In A. La Rosée, T. Fuhr, & E. W. Taylor (Eds.), *Transformative learning meets Bildung: An international exchange*. Sense Publishers.
- Ubaedillah, A. (2018). Civic Education For Muslim Students In The Era Of Democracy: Lessons Learned From Indonesia. *The Review of Faith & International Affairs*, 16(2), 50–61. <https://doi.org/10.1080/15570274.2018.1469837>